

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D. (2017). Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–15.
- Anjarwati. (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu pengantar*. Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Inpres, R. I. (1999). No. 7 Tahun 1999 Tentang. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Kojo, O., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2019). Analisis Penilaian Kinerja Sektor Publik (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- LAN, B. (2000). Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Londa, C. C. (2022). Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 437–448.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*.
- Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado. *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 1(5).

- Mahmud, R., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2016). Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1–17.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi*.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pendidikan, P., & Pelatihan, B. (2007). Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi). *Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rasul, S. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara*. PNRI.
- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021
- Rondonuwu, A., Rompas, W. Y., & Pombengi, J. D. (2015). Implementasi Good Governance di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(029).
- Santoso, S. (2013). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Sasmita, P. A. G., Cahyadi, M. F., Andriyani, N. L. F. S., Mutiari, K. N., & Sriasih, N. P. (2019). Pengelolaan Manajemen Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Dinas dengan Menggunakan Sistem Terpadu Berbasis E-SAKIP (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kab. Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3).
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat.

- Sugiyono. (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Wakhyudi, L. E. T., & Oktiarti, T. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan.
- Wide, E. (2017). *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Lakip (Studi Kasus Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2015)*. Universitas Andalas.
- Widianto, A. R. Z., & Karina, A. (2021). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasarkan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 7(1), 1–9.
- Winerungan, P. (2023). Evaluasi Penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1575–1584.
- Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 13(4), 545–558.

